

Volume 12, Nomor 2, Oktober 2006

ISSN 0852-9256

WAWASAN

JURNAL ILMU-ILMU SOSIAL

JW (JIS)	Vol. 12	No. 2	Hlm. 63-153	Medan, Oktober 2006	ISSN 0852-9256
----------	---------	-------	-------------	---------------------	----------------

Diterbitkan atas kerjasama

YAYASAN BINA MITRA WAWASAN

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

WAWASAN

JURNAL ILMU SOSIAL

Terbit tiga kali setahun pada bulan Februari, Juni, dan Oktober. Diterbitkan oleh Yayasan Bina Mitra Wawasan. Yayasan Bina Mitra Wawasan bertujuan untuk mengembangkan wawasan setiap masyarakat Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian, serta pengembangan masyarakat.
ISSN 0852-9256.

Ketua Penyunting

Safrin

Wakil Ketua Penyunting

Heri Kusmanto

Penyunting Pelaksana

Agus Suriadi

Edward

Humaizi

Ivan Razali

Mukhtar Effendi Harahap

Muryanto Amin

R. Hamdani Harahap

Subhilhar

Siswo Suroso

Zakaria Taher

Penelaah (Mitra Bestari)

Daniel Sparringa (UNAIR Surabaya)

Damsar (UNAND Padang)

M. Arif Nasution (USU Medan)

M. Syukri Saleh (USM, Penang Malaysia)

Pratikno (UGM Yogyakarta)

Pelaksana Tata Usaha

M. Arifin Nasution

Dedek Ardiansyah Siregar

Alamat penyunting dan tata usaha:

Jalan Dr. Sofyan No. 1 Medan, 20155

Telepon/Fax: 061-8211965

Wawasan adalah jurnal interdisiplin ilmu-ilmu sosial yang diperuntukkan sebagai analisis kritis dan diskusi tentang isu-isu pembangunan. Jurnal ini memberikan analisis dari semua disiplin ilmu sosial dan para intelektual yang tanggap terhadap pembangunan baik yang didasarkan telaah empirik, orientasi keilmuan, maupun perspektif sejarah, budaya, kebahasaan, dan lain-lain.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 10-20 halaman sebanyak 3 eksemplar (lebih lanjut silahkan baca Petunjuk pada sampul dalam belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh Penyunting Ahli dan atau Peninjau Ahli. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

W

Safrin
Syafriza

Rasyidir
Muham

Iskanda

Fauzi
Zulhar

Jonner

Febru

Badar

Henry

Reda

Berc
tent

DAFTAR ISI

Safrin Syafrizal Helmi S.	<i>Brand Management</i>	63 – 74
Rasyidin Muhammad Hasyem	Partisipasi Politik dalam Tatanan Politik Baru: Studi tentang Partisipasi Politik pada Partai Politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.....	75 – 81
Iskandar Zulkarnaen	Proses Damai Aceh; Analisa Kegagalan HDC dan Keberhasilan CMI.....	82 – 90
Fauzi Zulham	Teori Politik Kekuatan Eksogen dalam Studi tentang Kebangkitan Islam dan Pergerakan Sipil di Aceh.....	91 – 101
Jonner Hasugian	Analisis Relevansi Subyek Sitiran pada Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU Menggunakan Pendekatan <i>Dewey Decimal Classification</i>	102 – 109
Februati Trimurni	Etika dalam Pemerintahan.....	110 – 117
Badaruddin	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Komunitas (Studi pada Komunitas Petani Karet di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat).....	118 – 125
Henry Sitorus	Atribut Matriproduksi dalam Struktur Masyarakat Pantai Provinsi Sumatera Utara.....	126 – 142
Redatin Parwadi	Ruang Publik pada Media Radio (Studi Pemanfaatan Ruang Publik yang Disediakan Acara Komentar Anda RRI Pontianak).....	143 – 153

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 26/DIKTI/Kep./2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Wawasan Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial diakui sebagai **Jurnal Nasional Terakreditasi**.

JW (JIS)	Vol. 12	No. 2	Hal. 63 – 153	Medan, Oktober 2006	ISSN: 0852 – 9256
----------	---------	-------	---------------	---------------------	-------------------

Wawasan.
sia melalui

ritis dan
u sosial
mpirik,
in-lain.

ak lain.
nyak 3
masuk
ubahan
isinya.

PARTISIPASI POLITIK DALAM TATANAN POLITIK BARU: STUDI TENTANG PARTISIPASI POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Rasyidin
Muhammad Hasyem

Abstract: This research is aimed to know a criterion phenomenon between social groups and the level of social class in participating the political party in Nanggroe Aceh Darussalam. The research used descriptive method and the collection of data was done through observation, interview and documentation, as well as distribution frequency and percentage analysis. The results of this research show that the political participation in Nanggroe Aceh Darussalam has correlation with identification of social group in local community, particularly to the ethnic and religion. The community from a certain ethnic who is motivated to take participation in political party in Nanggroe Aceh Darussalam is rationally based on the particular values they possess

Keywords: participation, political party

PENDAHULUAN

Perubahan tatanan politik di Indonesia yang secara legalitas hukum tertuang dalam ketetapan MPR RI No. XIV/MPR/1998 tentang pemilihan umum, yang di dalamnya terkandung dua aspek fundamental terhadap perubahan tatanan politik di Indonesia yaitu adanya kebebasan mendirikan partai politik dan upaya memaksimalkan potensi demokrasi yang mungkin dilakukan. Provinsi NAD menurut data BPS 1997 tercatat berpenduduk sebanyak 4.231.000 jiwa, yang terbagi ke dalam lima kelompok sosial etnik lokal yaitu: Aceh, Gayo, Tamiang, Gayo Lues dan Singkil, serta dua kelompok sosial agama utama yaitu: Islam dan Kristen. Bila dikaitkan dengan perubahan tatanan politik Indonesia dengan sistem politik multipartai yang memungkinkan partisipasi politik dalam segala lapisan kelas dan kelompok-kelompok sosial dalam partai politik di Aceh, serta terbukanya saluran partisipasi politik secara luas terutama dalam pembentukan partai-partai politik, adalah aspek utama yang menjadi faktor determinan timbulnya partisipasi politik dalam bentuk keterlibatan individu dalam kepengurusan suatu partai politik.

Fokus penelitian ini ingin mengetahui fenomena keterkaitan antara kelompok sosial dan tingkat kelas sosial dalam partisipasi politik pada partai politik. Bila suatu kelompok sosial dan tingkatan kelas sosial tertentu sebagai suatu latar belakang sosial yang melekat pada suatu

individu mempunyai hubungan yang erat dengan peran partisipasi politik individu tersebut dalam partai politik, maka masyarakat NAD akan berpartisipasi politik dalam pembentukan dan kepengurusan parpol berdasarkan identifikasi kekuatan kelompok sosial dan status tingkatan kelas sosialnya.

Pada sisi lain timbulnya partisipasi politik masyarakat NAD dalam perubahan tatanan politik Indonesia terkait dengan keberadaan kelompok dan asosiasi sosial setempat. Penelitian ini sekaligus ingin memperoleh gambaran tentang distribusi kelompok sosial pada partai politik, motivasi individu dalam berpartisipasi politik pada partai politik, peran asosiasi sosial terhadap pembentukan partai politik serta aliran pemikiran politik yang berkembang dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif tentang partisipasi politik berupa keterlibatan individu pada partai-partai politik (Liddle, 1992: 14). Kesatuan sosial atau agregat sosial dalam penelitian ini adalah komunitas masyarakat yang bertempat tinggal dan tercatat sebagai warga masyarakat di Provinsi NAD, sedangkan unit sosial yang diangkat sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat pada suatu partai politik di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NAD.

Dalam penelitian ini, fokus realitas sosial yang dianalisis adalah keterlibatan individu dalam kepengurusan suatu partai politik dan partisipasi politik dalam pembentukan partai politik menjelang dilaksanakannya pemilihan umum 1999, yang difokuskan pada peran strata sosial individu serta kelompok sosial yaitu agama dan etnik yang menjadi latar belakang individu. Penelitian ini juga akan menganalisis motivasi individu yang berpartisipasi pada partai politik melalui pemahaman interpretatif (*interpretatif understanding*).

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan April 2003 sampai dengan akhir bulan Maret 2004. Populasi penelitian ini adalah seluruh partai politik yang memiliki Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I di Provinsi NAD. Sementara sampel yang diambil dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua tahapan dengan pengambilan secara purposif. Tahap pertama diambil sampel secara purposif sebanyak delapan partai, yaitu: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) 4. Partai Bintang Reformasi (PBR) 5. Partai Keadilan (PK) 6. Partai Bulan Bintang (PBB) 7. Golongan Karya (GOLKAR) 8. Partai Kebangkitan Umat (PKU) dan yang dijadikan unit analisis adalah pengurus partai. Selanjutnya dipilih secara purposif delapan responden yang masing-masing satu orang pengurus inti (dalam konteks ini adalah ketua umum, ketua dan sekretaris) untuk dijadikan sampel dalam memahami motivasi keterlibatan individu dalam suatu partai politik.

Selanjutnya pada tahap kedua, dipilih 4 partai politik yang berbasis pada satu asosiasi sosial, secara purposif dipilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) yang berasal dari asosiasi sosial Nahdlatul Ulama (NU). Untuk dijadikan sebagai sumber informasi penelitian atas peranan asosiasi sosial dalam pembentukan partai politik maupun perkembangan aliran pemikiran politik yang terdapat di dalam masyarakat NAD.

Berdasarkan masalah yang diteliti dan jenis data yang ingin diperoleh, maka dalam penelitian ini akan digunakan sejumlah kombinasi metode dan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, interview, dan dokumentasi diri

(*performance*). Selanjutnya guna menghindari pemahaman (interpretasi) yang bersifat subjektif berdasarkan validitas subjektif peneliti maka dilakukan konfirmasi pada dua orang *key informan* yang memahami persoalan partisipasi politik dalam suatu partai politik, juga pernah terlibat secara aktif pada suatu partai politik pada era Orde Baru di NAD.

Proses teknik analisis data berlangsung dalam beberapa tahapan. Pertama, melakukan observasi dan inventarisasi struktur kepengurusan partai politik yang dijadikan sampel. Selanjutnya dilakukan pembagian informasi data yang diperoleh menjadi tiga kelompok data yaitu:

- e) Data kuantitatif yang bersifat sekunder, ditujukan secara khusus untuk melakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan distribusi frekuensi dan analisis persentase.
- f) Data kuantitatif sekunder yang ditujukan secara umum untuk dijadikan sebagai bahan tambahan pendukung analisis deskriptif kualitatif.
- g) Data kuantitatif yang bersifat sekunder, yang ditujukan sebagai bahan pelengkap untuk memperkaya analisis deskriptif dari data kualitatif primer.

Selanjutnya data kuantitatif yang bersifat sekunder dilakukan prosedur teknik analisis sebagai berikut:

1. Analisis hubungan antara variabel, sesuai dengan rencana penelitian dengan menggunakan tabel silang, distribusi frekuensi dan analisis persentase.
2. Dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel-variabel penelitian dengan mengembangkan interpretasi sosiologis terhadap data-data kuantitatif yang telah diperoleh sebelumnya.

Pada tahapan kedua, adalah melakukan observasi dan wawancara mendalam baik sifatnya terstruktur maupun bebas. Unit analisis yang digunakan pada tahapan ini adalah 8 orang sampel yang masing-masing adalah pengurus eksekutif partai politik dari 8 partai politik yang dijadikan sampel sebelumnya. Pengurus partai secara khusus dipilih yang memiliki jabatan kepengurusan sebagai ketua, wakil ketua ataupun sekretaris umum. Analisis terhadap informasi data yang diperoleh diinterpretasi secara fungsional dengan tujuan memperoleh pemahaman

motivasi individual berpartisipasi secara politik dalam konteks aktif terlibat sebagai pengurus partai politik. Upaya analisis ini ditujukan secara khusus memahami dunia makna responden berdasarkan eksplisitas tindakan dan sikapnya berpartisipasi politik sebagai pengurus partai politik.

Pada tahap ketiga dilakukan wawancara secara mendalam pada 4 orang sampel dari pengurus partai politik dengan basis aliran Nahdlatul Ulama (NU). Basis aliran NU dijadikan sebagai sebuah unit analisis guna memahami fenomena partisipasi politik pembentukan suatu partai politik yang berasal dari asosiasi sosial yang sama dan isu politik yang juga sama. Analisis yang dilakukan adalah bersifat interpretatif logis dan diperdalam dengan penafsiran yang memanfaatkan hasil-hasil penelitian lain yang sangat berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan.

Secara umum hasil analisis pada tahap kedua dan ketiga diinterpretasi secara logis dan fungsional dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Penjelasan deskriptif dari data yang diperoleh dengan membatasi pada fenomena-fenomena sosial yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b) Interpretasi terhadap hasil analisis deskriptif dengan menghubungkan secara fungsional dengan fenomena-fenomena sosiologis-politik yang aktual pada saat penelitian berlangsung.
- c) Interpretasi terhadap hasil analisis deskriptif dikaitkan secara logis dengan data-data

statistik maupun data hasil penelitian sebelumnya dengan dibatasi pada fenomena yang relevan dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Kelompok Sosial Etnik

Kelompok etnik yang berpartisipasi politik pada partai politik dibagi ke dalam 6 kategori, yaitu etnik asli NAD yang terdiri dari etnik Aceh, Gayo, Gayo Lues, dan Tamiang kemudian juga dapat diidentifikasi etnik Cina dan etnik asli Indonesia yang berasal dari luar Provinsi NAD. Secara keseluruhan etnik Aceh yang terlibat sebagai pengurus partai politik, baik eksekutif maupun legislatif mencapai 75,8 persen, etnik Gayo sebesar 9,2 persen, dan etnik Indonesia yang berasal dari luar Aceh dan menetap di NAD pada kepengurusan partai politik mencapai 4,1 persen. Sementara untuk etnik Tamiang dan Gayo Lues masing-masing hanya sebesar 5,9 persen dan 5,0 persen.

Di NAD saluran mobilitas merupakan jalan menuju partisipasi politik dalam organisasi politik. Konteks tersebut sangat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan daripada berkaitan dengan jumlah populasi suatu etnik. Hasil penelitian tersebut juga menggambarkan bahwa terdapat hubungan yang mendasar antara kelompok etnik dengan partisipasi individual dari etnik tersebut pada kepengurusan suatu partai politik (Geertz, 1983: 98).

Tabel 1.
Distribusi Kelompok Etnik dalam Jabatan Kepengurusan Partai Politik pada Sepuluh Partai Politik di NAD Tahun 2004

Jenis Jabatan Pengurus Partai	Kelompok Etnik					Jumlah
	Aceh	Gayo	Gayo Lues	Tamiang	Singkil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketua umum	8	1	1	-	-	10
Ketua/wakil ketua	51	11	44	2	17	89
Sekretaris umum	6	1	2	1	1	10
Wakil sekretaris	27	18	21	1	7	56
Bendahara umum	6	-	21	-	1	10
Wakil bendahara	11	8	21	5	1	28
Jumlah	112	39	89	8	27	203

Sumber: Penelitian lapangan April 2003 – Maret 2004.

Tabel 2.
Distribusi Kelompok Agama dalam Jabatan Kepengurusan Eksekutif Partai Politik pada Sepuluh Partai Politik di NAD Tahun 2004

Jenis Jabatan Pengurus Partai (1)	Kelompok Agama			Jumlah (5)
	Islam (2)	Kristen (3)	Budha (4)	
Ketua umum	9	1	-	10
Ketua/ wakil ketua	71	10	8	89
Sekretaris umum	9	1	-	10
Wakil sekretaris	49	5	2	56
Bendahara umum	9	1	-	10
Wakil bendahara	21	50	11	82
Jumlah	168	68	21	257

Sumber: Penelitian lapangan April 2003- Maret 2004.

Sementara berdasarkan data hasil penelitian pada tabel 1 menggambarkan adanya keterkaitan yang mendasar antara jabatan yang dimiliki oleh seseorang dalam kepengurusan eksekutif dengan kelompok etnik yang melekat pada individu pengurus partai politik tersebut. Sehingga secara umum pula dapat disimpulkan bahwa jabatan ketua umum dalam kepengurusan eksekutif suatu partai politik sangat berkaitan dengan populasi terbesar kelompok etnik yang terdapat di NAD. Jabatan ketua atau wakil ketua menggambarkan fleksibilitas distribusi pada kelompok etnik. Jabatan sekretaris dan bendahara dalam kepengurusan eksekutif partai politik seperti juga dengan ketua umum, dianggap memiliki akses politik dalam identifikasi etnik guna penggalangan massa.

Partisipasi Politik Kelompok Sosial pada Perspektif Agama

Partisipasi politik pemeluk agama Islam sangat dominan bila dibandingkan dengan masyarakat NAD, pemeluk agama selain Islam (Non-Islam) persentasenya sangat minimal jumlahnya, itu pun hanya terdapat pada etnik Cina saja. Keterlibatan yang sangat minim dari kelompok non-Islam secara khusus juga tampak pada partai yang berbasas pluralis, hanya sebesar 11,0 persen dari keseluruhan jumlah mobilitas individu yang berpartisipasi politik. Pada masyarakat NAD, kelompok agama yang minoritas cenderung untuk tidak mengambil tindakan partisipasi politik dengan melakukan organisasi kolektif berdasarkan segregasi agama, dan lebih memilih berpartisipasi pada tindakan ekonomi dan kependidikan ataupun tindakan politik pemberian suara pada pemilu.

Distribusi kelompok sosial agama dalam kepengurusan eksekutif partai politik di NAD sangat berkoherensi dengan besarnya proporsi kelompok agama yang terdapat di NAD. Pada Tabel 2 tampak dominasi kelompok sosial agama Islam dalam kepengurusan partai politik mencapai 95,7 persen dari keseluruhan 257 yang tercatat berpartisipasi dalam partai politik. Sedangkan kelompok sosial agama non-Islam jumlah individunya yang berpartisipasi dalam partai politik sangat minim atau sekitar 3.3 persen untuk agama Kristen dan agama Budha hanya 1 persen saja.

Peranan Kelompok Elit pada Kepengurusan Partai Politik

Di NAD terdapat peranan yang besar dari kelas elit yang berpartisipasi dalam partai politik. Pimpinan eksekutif dari partai politik secara keseluruhan merupakan golongan kelas elit (Journal Participation 1988: 14). Hal ini sangat berkaitan dengan asumsi bahwa kelas elit merupakan kelas penentu yang memiliki kemampuan tertentu dalam melakukan penggalangan massa untuk menjadi pendukung suatu partai politik (Alford, 1975: 12). Selain itu faktor jarak waktu yang sangat sempit antara persiapan pendirian suatu partai politik dengan pemilihan umum yang direncanakan pada bulan April 2004, menimbulkan problema fungsional dalam konstelasi politik dan sosial di mana partai politik kemudian diupayakan menjadi sebuah subsistem yang harus diterima oleh masyarakat sebagai sebuah eksistensi baru (Almond, 1963: 43). Pada sisi lain partai

politik be
fungsional
masyarakat,
meraih duk
Kondisi ters
untuk terli
pada partai
105). Para
partai poli
eksternal ya
elit ilmiah,
serta elit ke
Ber
dilakukan, i
ciri-ciri ke
kepengurus
Terdapat d
besar tidak
politis dari
nilai sosia
politik dibar
memiliki ke
ekonomi, d
perubahan
determinan
persepsi p
dengan kek
pranata pol

Motivasi B

Ter
yang berpe
bermotivas
persen ber
persen ber
hanya 10
bertujuan.
elit dalam
atas dasar

Motivasi

Kateg

- (1)
- Menyalurk
- Pengabdian
- Memperju
- Kepenting

Sumber: F

politik berupaya untuk masuk secara fungsional ke dalam sistem-sistem sosial masyarakat, agar dapat tersosialisasi dan mampu meraih dukungan sosial sebanyak mungkin. Kondisi tersebut mengangkat peran kaum elit untuk terlibat secara dominan berpartisipasi pada partai-partai politik (Huntington, 1994: 105). Para individu elit yang terlibat dalam partai politik di NAD berasal dari elit eksternal yaitu elit politik (mantan birokrat), elit ilmiah, dan elit internal yaitu: elit agama serta elit keturunan bangsawan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, nilai sosial atau asal-usul sosial dan ciri-ciri kepribadian sangat dominan dalam kepemimpinan partai eksekutif di NAD. Terdapat determinasi kekuasaan yang sangat besar tidak sekedar secara sosial bahkan secara politis dari individu-individu yang memiliki nilai sosial yang berpartisipasi dalam partai politik dibandingkan dengan individu-individu yang memiliki kekuasaan pada pranata-pranata politik, ekonomi, dan militer (Orum, 1966: 75). Faktor perubahan iklim politik membawa dampak determinan yang sangat besar terhadap perubahan persepsi politik masyarakat terutama berkaitan dengan kekuasaan yang terdapat dalam pranata-pranata politik.

Motivasi Berpartisipasi Elit dalam Partai Politik

Terdapat hanya 30 persen individu elit yang berpartisipasi politik pada partai politik bermotivasi nonrasional afektif. sedangkan 70 persen bermotivasi rasional, dengan perincian 60 persen berdasarkan motivasi rasional bernilai dan hanya 10 persen dengan motivasi rasional bertujuan. Motivasi berpartisipasi para individu elit dalam partai politik di NAD sebagian besar atas dasar rasional yang bertendensi dengan

nilai-nilai tertentu yang dianggap absolut dan sangat berkaitan dengan adanya komitmen subjektif di mana tujuan berpartisipasi dalam politik sudah tercakup di dalam komitmen tentang nilai yang dianggap sebagai sebuah tindakan yang telah diperhitungkan dan pertimbangan yang dilandasi oleh suatu kesadaran pikir.

Pada tabel 3 menggambarkan bahwa para individu berpartisipasi politik dalam partai politik berkisar pada pengabdian dan perjuangan tentang nilai-nilai yang dirasionalkan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan seperti besar kecilnya suatu partai, respon masyarakat, peluang memenangkan pemilu, ataupun potensi-potensi politik yang mungkin dapat diperoleh sebagai suatu konsekuensi keaktifan, sama sekali tidak relevan dengan motivasi dalam berpartisipasi (Norman, 1972: 23).

Konflik Kepentingan Elit dalam Asosiasi Sosial

Terbentuknya empat partai politik dengan basis asosiasi sosial yang sama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Ummat (PKU), Partai Nahdlatul Ummah (PNU), dan Partai SUN, merupakan fenomena adanya pluralitas kepentingan elit dalam suatu asosiasi sosial yang secara ideologis tidak dapat ditampung dalam satu partai saja. Keempat partai politik yang terbentuk dari asosiasi sosial NU secara substansial bukanlah mewakili empat isu politik yang terdapat dalam asosiasi sosial NU dan diangkat sebagai suatu ekspresi politik. Analisis yang dilakukan menampakkan pertama adanya kepentingan kelompok elit yang berkaitan dengan konteks wawasan ideologis ke-Islaman, kedua terdapat konflik politik antarelit yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik.

Tabel 3.

Motivasi Pimpinan Eksekutif yang terlibat sebagai Pengurus Partai Politik pada Delapan Partai Politik di NAD dalam Persentase

Kategori Tujuan berpartisipasi	Karakter Motivasi	Jumlah (N)	persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Menyalurkan aspirasi	Non rasional afektif	3	30
Pengabdian kepada umat	Rasional bernilai	3	30
Memperjuangkan cita-cita klp	Rasional bernilai	3	30
Kepentingan individual	Rasional bertujuan	1	10
Jumlah Total		10	100

Sumber: Penelitian lapangan April 2003 – Maret 2004

Kepentingan kelompok elit dalam asosiasi sosial NU juga mengimplisitkan adanya perbedaan ideologis ke-Islaman yang diakomodir dalam jalur pembentukan partai politik sebagai sebuah ketegasan akan adanya perbedaan ideologis dalam memahami politik. Konteks tersebut menggambarkan adanya pluralitas ideologi pada suatu komunitas asosiasi sosial. PKB mencetuskan diri sebagai perwakilan kelompok intelektual muda yang melakukan pemberontakan terhadap golongan "orang-orang tua" yang ada dalam asosiasi sosial NU. Sementara PKU dan PNU mengidentifikasi diri sebagai komponen politik yang lurus dengan perjuangan khittah NU. Partai SUNI sendiri lebih mencerminkan diri sebagai partai yang mengakomodir Islam nasionalis dalam NU.

Pengaruh yang fundamental dari konflik antar elit pada organisasi asosiasi sosial Islam tradisional di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama pada tingkat pusat juga sebagai suatu faktor yang menggambarkan terjadi perembesan konflik elit sampai pada tingkat wilayah khususnya NAD. Kondisi tersebut didukung oleh fakta dukungan dan antusiasme kelompok elit NU di NAD untuk mengambil posisi politik pada empat partai yang terbentuk dari asosiasi sosial Islam tradisional NU. Keterlibatan para elit NU pada empat partai politik yang berbeda pada aspek lain mencerminkan sebagai suatu pola penampungan kepentingan-kepentingan politik yang terdiferensiasi secara ideologis sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam perspektif konflik kepentingan tetapi memiliki dampak yang sistemik fungsional bagi asosiasi sosial Islam tradisional pada umumnya serta NU pada khususnya, di mana semua elit dengan kepentingan politik yang berbeda masing-masing memperoleh wadah partisipasi politik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kelompok sosial berupa etnik dan agama masih memiliki relevansi logis terhadap partisipasi politik masyarakat di NAD. Besarnya jumlah kuantitas populasi suatu etnik maupun kelompok agama berhubungan dengan jumlah distribusi individu etnik dan penganut agama tersebut pada suatu partai politik. Keberadaan elit eksekutif sebagai

tokoh pimpinan pada suatu partai politik berkaitan dengan identifikasi besar kelompok etnik dan agama yang terdapat pada populasi masyarakat NAD. Sehingga terdapat keterkaitan antara identifikasi diri secara kelompok suatu individu dengan partisipasi politiknya pada partai politik.

2. Masyarakat NAD yang berpartisipasi politik pada tingkatan individual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu yang dipahami secara subjektif dan terkait dengan identitas kelompok agama yang dianut serta perspektif politik yang menjadi landasan motivasi dalam berpartisipasi politik dengan terlibat sebagai pengurus suatu partai politik.
3. Masyarakat NAD pada dataran kolektif berpartisipasi politik terkait dengan identifikasi asosiasi sosial yang mewakili suatu aliran pemikiran politik tertentu. Secara intern dalam suatu asosiasi sosial terdapat konflik pada dataran elit yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan politik secara implisit sangat bertendensi ideologis. Konflik elit pada asosiasi sosial tersebut termanifestasi melalui partisipasi elit dari asosiasi-asosiasi sosial pada partai-partai politik yang berbeda.

Saran

1. Perlunya sosialisasi politik mengenai saling menghargai perbedaan secara politik, terutama pada masyarakat-masyarakat tradisional, guna menghindari konflik kelompok yang dapat mengarah pada implikasi disintegrasi.
2. Perlunya dibentuk semacam forum komunikasi antar partai yang menonjolkan jalur musyawarah dan kebersamaan, sekaligus sebagai ajang pematangan politik.
3. Pentingnya memaksimalkan peran cendekiawan agama atau ulama dan tokoh adat tradisional untuk menanamkan pemahaman politik secara benar di NAD, sementara untuk jangka panjang dapat ditempuh jalur kurikulum pendidikan menengah atas untuk memasukkan pendidikan politik dalam rangka membina keterbukaan ideologis generasi muda, sebagai upaya mengantisipasi perjalanan bangsa dan negara ke depan yang sangat diwarnai oleh pluralitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, Robert dan Roger Friedland. 1975. *Political Participation*. Annual Review of Sociology Volume I. Palo Alto, Annual Review, Inc.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1963. *The Civic Culture: Public Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton, Princeton University Press.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan YIIS. Jakarta, Pustaka Jaya.
- Huntington, P Samuel dan John Nelson. 1994. *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*. Diterjemahkan Oleh Sahat Simamora: Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta, PT Rhineka Cipta.
- Liddle, R. William. 1992. *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta, Grafiti Press.
- Orum, M. Anthony. 1966. *A Reappraisal of the Social and Participation of Negroes*. American Journal of Sociology, Volume 72. Verba, Sidney dan Norman H. Nie. 1972. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper and Row Publisher.